

## Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap *Human Security* di Afrika Selatan (*The Threats of Corrective Rape Phenomenon towards Human Security in South Africa*)

Yusnan Hadi Mochtar, Suyani Indriastuti, Linda Dwi E.  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto, Jember, Kotak Pos 159

E-mail: yusnanhadimochtar@gmail.com, s\_indriastuti@yahoo.com, elindadwi@yahoo.com

### Abstract

*One of the most problematic problems faced by South African Lesbians is corrective rape phenomenon. This action is done by particular people to cure and make them being real South African Women. Real South African Woman is when a woman turns to be heterosexual, a mother and taking care of children. It is believed that it is not a humanistic action and threatens the lesbian security. As an unsolved problem, lesbian is being alienated when it occurs. Lesbian cannot access security because government does not consider this problem seriously. In fact, South Africa is one of the most progressive countries in glorifying human right idea. It is proven by 1996 South African Constitution which forbids discrimination based on personal identity preferences, especially sexual orientation. In this case, this study will analyze threats of corrective rape phenomenon toward human security, specifically lesbians by using liberal feminist theory. It is more interesting to use the theory because this phenomenon relates to gender-based violence which becomes the concern of feminists. The analysis is about how it can happen. It uses government points of view on how government works in practical level leading to that process.*

**Keywords:** corrective rape, human security, equality

### Pendahuluan

Martin *et al.* (2009:3) mengatakan bahwa transisi Afrika Selatan menuju demokrasi telah menjadi sumber harapan dan inspirasi bagi jutaan warga domestik maupun dunia dalam menjunjung kesetaraan dan hak azasi manusia. Namun demikian, perjalanan proses demokrasi ini masih mengalami hambatan dan tantangan seperti kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Salah satu contoh penghambat tersebut adalah fenomena perkosaan korektif terhadap kaum lesbian.

'Corrective rape' merupakan istilah yang digunakan pertama di Afrika Selatan pada awal tahun 2000-an oleh organisasi-organisasi hak azasi manusia ketika perkosaan terhadap lesbian meningkat (Polity Organisation. Tanpa Tahun). Perkosaan korektif adalah ketika seorang lesbian diperkosa untuk menjadikan perempuan lesbian tersebut heteroseksual. Laki-laki mengungkapkan bahwa "memperbaiki atau menyembuhkan" perempuan-perempuan lesbian merupakan bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas (Dominique, 2012). Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk 'hukuman' bagi kaum lesbian (Silvio, 2011). Pada sisi lain, laki-laki yang melakukan kekerasan seksual ini, percaya bahwa dengan memperkosa mereka akan menjadikan mereka 'perempuan Afrika yang sesungguhnya' (Pemimpin Redaksi, 2009).

Simphiwe Thandeka adalah salah satu dari korban perkosaan korektif. Ia diperkosa sebanyak tiga kali pada usia 13 tahun oleh pamannya. Pamannya berencana

menikahkan dia dengan teman pamannya yang bertujuan menyembuhkan orientasi seksualnya. Sebelum menikah ia dipaksa berhubungan seksual. Keesokan harinya, calon suaminya mengembalikan Pimphiwe dan sejumlah uang ke pamannya dan mengatakan bahwa meskipun Pimphiwe telah diperkosa, Pimphiwe masih merupakan seorang lesbian dan teman pamannya tidak dapat menikahinya. Ia pun hamil karena teman pamannya dan Ia tertular *HIV/Aids* dari pamannya sendiri yang ketika waktu itu juga memperkosanya. Meskipun demikian, orang tua Pimphiwe tidak pernah menceritakan bahwa pamannya sendiri telah tertular *HIV/Aids*. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, ia diperkosa kembali oleh seorang pendeta (Carter, 2013).

Melalui fenomena perkosaan korektif, penulis dapat menggambarkan bahwa fenomena tersebut adalah bentuk penolakan sosial terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT) terutama lesbian. Afrika Selatan merupakan contoh kasus yang menarik dalam melihat diskriminasi dan fenomena kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Mengingat secara teoritis, Afrika Selatan telah berkomitmen untuk mengeradikasi kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual melalui pembentukan Konstitusi 1996.

Pada dasarnya, perkosaan korektif melanggar beberapa prinsip khususnya Konstitusi tahun 1996 yang menjamin kesetaraan dan melarang diskriminasi berbasis orientasi seksual. Melalui fenomena ini, pemerintah Afrika Selatan gagal dalam melindungi warga negaranya secara adil. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi dalam menyediakan hak

keamanan dan perlindungan bagi suatu komunitas yaitu LGBT terutama lesbian.

Eksistensi perempuan di Afrika Selatan sangat rawan memperoleh ancaman kekerasan berbasis gender terlebih lagi jika perempuan tersebut berkulit hitam dan lesbian. Disisi lain, Afrika Selatan disebut sebagai ibukota perkosaan dunia (Pemimpin Redaksi, 2014). Melalui fakta tersebut, perkosaan memang merupakan masalah yang problematik, mengakar dan menjadi ancaman utama bagi kaum perempuan terutama lesbian di Afrika Selatan. Sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual, perkosaan korektif memiliki intensitas ancaman lebih tinggi dibandingkan fenomena *homophobia* lain seperti *bullying*, *hate speech*, dan lain-lain yang dialami LGBT terutama lesbian di Afrika Selatan. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis berpandangan bahwa fenomena perkosaan korektif sangat mengancam *human security* dari kaum lesbian. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah mengenai “Bagaimana Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap Human Security di Afrika Selatan?” Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui ancaman fenomena perkosaan korektif terhadap *Human Security* di Afrika Selatan.

### Kerangka Pemikiran

#### Feminis Liberal

Karya tulis ini akan dianalisa menggunakan feminis liberal dan *human security* karena menyangkut liberasi perempuan dari tindakan opresif seperti perkosaan korektif yang mana hal ini termasuk dalam kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Berkenaan dengan *human security*, pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi hak keamanan bagi individu secara merata. Kedua kerangka berpikir tersebut saling melengkapi satu sama lain karena memiliki kesamaan tujuan yaitu menjunjung hak azasi, mengangkat harkat dan derajat manusia.

Feminisme liberal percaya bahwa perempuan adalah makhluk rasional, agen yang bebas dan individual (Kotef, 2009:50). Beberapa hal yang menjadi fokus feminisme liberal adalah kesetaraan perempuan dalam hukum, pendidikan, perubahan dalam undang-undang pernikahan, hak milik, perlindungan dari perkosaan, liberasi dari kekerasan tidak manusiawi. Feminisme liberal lebih memilih jalan tidak lebih radikal dalam merubah dan mentransformasi struktur masyarakat. Hal ini dilakukan melalui advokasi perubahan norma masyarakat seperti struktur hukum (Singh, Tanpa Tahun:62).

Liberasi perempuan dapat dicapai melalui kerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah karena pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap warganya. Hal ini dilakukan melalui pembuatan kebijakan secara legal untuk memproteksi dan menjunjung hak-hak perempuan. Dengan adanya proteksi secara legal maka diharapkan tatanan masyarakat *sexis* dapat berubah. Liberasi

merupakan hal penting bagi setiap individu. Liberasi bagi kaum perempuan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengejar kesetaraan dengan laki-laki. Pembatasan hak-hak perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain menjadikan perempuan tertinggal dan berstatus sebagai individu inferior. Akses kebutuhan *security* secara adil juga menjadi perhatian bagi kaum feminis liberal karena kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual seperti perkosaan telah membatasi kebutuhan keamanan perempuan terutama kaum lesbian.

Rendahnya proteksi terhadap lesbian mencerminkan status lesbian sebagai individu inferior. Hal ini mengarah pada kondisi tidak aman kaum lesbian. Melalui kondisi tidak aman inilah feminisme dapat menganalisa ancaman fenomena perkosaan korektif terhadap *human security*. Kenapa? Karena perempuan merupakan objek utama penindasan hak azasi yang menjadi perhatian kaum feminis terutama feminis liberal.

#### Human Security

Komisi *Human Security* mendefinisikan *human security* sebagai, “...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment”. *Human security* berarti melindungi kebebasan-kebebasan sebagai esensi kehidupan. Hal ini berarti melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan situasi yang bersifat genting dan meluas. *Human security* menginginkan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama menjunjung harkat dan martabat manusia (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009:6).

Konsep keamanan dari *state centric* hanya memiliki fokus pada terhindarnya suatu negara dari agresi militer. Namun saat ini telah berkonsentrasi pada keamanan individu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa individu merupakan pusat analisis dari *human security* sebagai konsep *people-centered* (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009:7)

Perkembangan konsep keamanan terjadi karena tuntutan zaman. Ancaman bersifat lebih beragam dan menyentuh dimensi sosial yang mana harus menjadi fokus negara untuk diselesaikan. Contoh ancaman tersebut adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, krisis pangan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, *human security* hadir sebagai kerangka dan panduan negara dalam menciptakan kebijakan yang memprioritaskan pemenuhan keamanan manusia. Dalam hal ini, kebijakan yang berorientasi militer cenderung bukan lagi menjadi prioritas negara.

*Human security* memiliki bentuk-bentuk keamanan seperti *economic, food, health, environmental, personal, community and political security* (UNDP, 1994). Dalam karya tulis ini akan dibahas bagaimana perkosaan korektif merupakan ancaman terhadap *human security* terutama dari segi *community, personal, dan health security*.

*Community security* menginginkan suatu komunitas terhindar dari praktik-praktik tradisional yang bersifat

opresif, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap etnis atau penduduk asli dan pengungsi, pemberontakan suatu kelompok dan konflik bersenjata. *Personal security* menyangkut security dari kekerasan fisik dan dari berbagai ancaman. Ancaman terhadap perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan atau pemerkosaan, terorisme, dan lain-lain merupakan konsen dari *personal security*. Dalam hal ini, dimensi *personal security* diasosiasikan dengan “kebebasan dari rasa takut”. *Health security* menyangkut ancaman salah satunya seperti penyakit mematikan. Hal ini menuntut layanan kesehatan yang memadai (Tadjbakhsh dan Chenoy, 2006:15).

### Metode Penelitian

Karya tulis ini bersifat studi pustaka dan data yang diperoleh merupakan data sekunder. Sumber-sumber data sekunder tersebut adalah buku dan data dari internet berupa jurnal maupun berita. Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan FISIP Universitas Jember, *University Student English Forum (USEF) Mini Library*, merupakan lokasi penelitian tersebut.

Data dalam karya tulis ilmiah ini akan diolah secara deduktif kualitatif. Pada penulisan ini, digunakan metode analisa deduktif, mengingat penekanan awal terletak pada kasus secara general, untuk kemudian dicari teori atau konsep yang sesuai untuk menganalisa kasus tersebut. Deduktif merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum, untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis deduktif kualitatif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, empirik dan akurat mengenai fakta-fakta dalam kasus yang diteliti (Rachmawati, 2003).

### Hasil Penelitian

Feminis liberal memiliki beberapa poin dalam memandang fenomena perkosaan korektif yang merupakan bentuk ketidaksetaraan dalam aspek keamanan bagi kaum lesbian di Afrika Selatan. Secara teoritis, Afrika Selatan dikatakan sebagai negara yang progresif dalam menjunjung kesetaraan bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Namun bagaimana perkosaan korektif masih saja terjadi dan mengancam kaum lesbian? Poin pertama mengenai kerangka legal seperti perundang-undangan yang sangat peduli terhadap kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Feminis liberal memandang bahwa pemerintah harus terlibat dalam menjamin proteksi bagi suatu pihak dengan membentuk suatu kebijakan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa kebijakan tersebut harus bersifat jelas untuk mengurangi celah pelanggaran terhadap perundang-undangan yang telah terbentuk. Kedua, mengenai komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan undang-undang tersebut, apakah masyarakat telah *well educated* terhadap ide hak azasi atau sebaliknya.

Perkosaan korektif terjadi ketika tidak ada proteksi secara equal dari pemerintah terhadap kaum perempuan terutama lesbian. Upaya perlindungan terhadap suatu kelompok memerlukan suatu kebijakan perundang-undangan. Hal tersebut juga bagian dari upaya kaum liberal feminis dalam menghapus ketidaksetaraan khususnya dalam hal aspek keamanan bagi individu melalui keterlibatan pemerintah. Tanggungjawab utama dimiliki pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya khususnya dalam aspek keamanan seperti kebebasan dari rasa takut dan opresi, berekspresi dan lain sebagainya tanpa memandang latarbelakang personal.

Kebijakan perlindungan LGBT dalam menjunjung kesetaraan gender berfungsi sebagai tuntunan bagi pemerintah dan masyarakat dalam bertindak. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Afrika Selatan telah memiliki beberapa undang-undang yang konsen terhadap kekerasan berbasis gender. Perkosaan korektif termasuk dalam kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual yang mana hal ini telah melanggar konstitusi Afrika Selatan dan perundang-undangan lainnya yang sangat menjunjung kesetaraan dan ide hak azasi manusia. Sebagai korban perkosaan korektif, kaum lesbian telah dilanggar harkat dan martabatnya serta terabaikannya hak azasi yang dimilikinya sejak lahir.

Kebijakan perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dalam menjamin perlindungan bagi kaum perempuan lesbian menandakan bahwa pemerintah Afrika Selatan berkomitmen dalam mengeradikasi kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Melalui perspektif feminis liberal bahwa pembuatan kebijakan secara legal belum cukup. Hal ini harus diikuti oleh pengimplementasian secara nyata kebijakan-kebijakan tersebut baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan tersebut belum terimplementasi. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keamanan bagi perempuan di Afrika Selatan sangat rendah terlebih lagi jika perempuan tersebut merupakan lesbian. Adanya perkosaan korektif terhadap kaum lesbian merupakan bukti nyata bahwa ide proteksi terhadap kaum LGBT belum terealisasi.

Rendahnya pendidikan dan komitmen dari pemerintah seperti *Department of Justice* adalah sumber terjadinya kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual. Pemerintah belum berfungsi secara maksimal dalam memonitor legislasi kesetaraan yang ada. Rendahnya komitmen dan edukasi dalam Lembaga kehakiman dan kepolisian juga berkontribusi terhadap terjadinya perkosaan tersebut. Meskipun pemerintah telah hadir sebagai aktor yang seharusnya bertanggungjawab dalam melindungi warganya, mereka masih belum mengakses hak dan proteksi tersebut (Mathonsi, 2011). Karena pada kenyataannya, para korban perkosaan kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual enggan melaporkan kasus perkosaan yang mereka alami.

Alasan mereka enggan melaporkan adalah

rendahnya hukuman dan kasus yang terbukti dinyatakan bersalah. Statistik menunjukkan bahwa setiap 25 orang yang dituduh melakukan pemerkosaan di Afrika Selatan, 24 terbebas dari hukuman. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menerapkan mekanisme hukum yang memadai untuk mengadili para terdakwa (Coopersmith, Tanpa Tahun). Selain itu terdapat intimidasi korban dari pelaku, ketakutan akan terjadinya balas dendam, stigma terhadap para korban pasca perkosaan, ketakutan intimidasi dari otoritas negara, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat negara. Alasan yang sama juga berlaku pada lesbian dan transgender (Gontek, 2009). Bahkan jikapun pihak terkait menerima laporan dari korban, kasus tersebut akan tertunda dan korban tidak dipercaya oleh hakim dan secara sosial disalahkan (Anguita, 2011). Aparat menganggap bahwa penyebab perkosaan terjadi adalah karena perempuan itu sendiri yang berpakaian kurang sopan dan memancing perkosaan terjadi. Selain itu menurut suatu studi yang dilakukan oleh *University of Rhodes* menemukan bahwa dalam beberapa kasus polisi disuap sekitar \$120 oleh pelaku untuk dapat membebaskan pelaku dari sidang (Dominique, 2011). Hal-hal inilah yang mendorong para korban tidak melaporkan kasus tersebut pada polisi (*Rape Crisis Organisation*. Tanpa Tahun).

Inkompetensi pemerintah dalam kasus tersebut turut berkontribusi bagaimana perkosaan korektif dapat terjadi dan mengancam *security* kaum lesbian. Selain itu, adanya kelemahan dalam suatu kebijakan perundang-undangan juga berkontribusi bagaimana *security* kaum LGBT terancam.

Meskipun konstitusi Afrika Selatan secara spesifik melarang diskriminasi terhadap LGBT, kejahatan terhadap LGBT belum dikategorikan sebagai *hate crime*. Hal ini yang menjadikan kekerasan terhadap lesbian tidak terdata (Hughes, 2009). Padahal data tersebut dapat mendorong kemudahan pemerintah dalam menganalisa dan menemukan solusi masalah tersebut. Lemahnya perundang-undangan juga menjadikan aparat negara terutama kehakiman dan polisi sulit untuk memutuskan dan menghukum tersangka karena tidak adanya aturan spesifik mengenai perkosaan korektif.

Dalam konteks fenomena perkosaan korektif, kaum lesbian merupakan korban pelanggaran hak azasi manusia. Hal ini juga menyangkut eksistensi mereka yang belum setara dalam mengakses hak perlindungan dari pemerintah. Inilah yang menjadi konsen bersama antara human security dan feminist selama ini bagaimana sebenarnya negara harus menjamin hak untuk hidup aman secara setara tanpa membedakan identitas personal dari masing-masing individu.

Perkosaan korektif mengancam *community security* kaum LGBT terutama lesbian. Perkosaan korektif yang memeberikan pesan bahwa komunitas LGBT tidak layak untuk eksis dan pantas mendapat perlakuan opresif dari suatu pihak. Padahal dalam ide *community security* menginginkan suatu kelompok harus terhindar dari praktek opresif. Hal ini juga menjadi perhatian kaum

feminis liberal bahwa senyatanya perempuan harus terbebas dari gender role yang opresif. Sementara itu, perkosaan korektif adalah representasi tindakan opresif terhadap perempuan.

Aktor kekerasan terhadap lesbian cenderung laki-laki muda yang berkulit hitam. Kebanyakan sasaran dari serangan tersebut adalah lesbian yang berkulit hitam. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi demografi dan beberapa faktor lain salah satunya seperti penampilan fisik individu (Stephens, 2010).

*Gender expression* merupakan hal penting bagi kaum lesbian. Ada istilah “femme” dan “butch” yang menggambarkan hubungan sosial dan seksual. Femme Lesbian bersifat invisible dalam suatu masyarakat luas karena dapat menyesuaikan penampilan mereka seperti perempuan pada umumnya. Sehingga identitas seksual mereka dapat tersembunyi. Hal ini berbanding terbalik dengan butch lesbian yang berkarakteristik boyish dan lebih rentan terhadap ancaman fenomena perkosaan korektif. Karena mereka tidak mengimplementasikan ekspektasi masyarakat mengenai bagaimana penampilan perempuan seharusnya. Sehingga identitas mereka sebagai lesbian lebih *visible* dalam masyarakat. Masyarakat akan menyalahpahami bahwa lesbian adalah perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Oleh sebab itu, butch lebih rentan menjadi sasaran dari perkosaan korektif (Human Rights Watch, 2011:19). Terlebih lagi bagi mereka yang berkulit hitam, miskin, dan berprofesi sebagai buruh sangat rentan terhadap perkosaan korektif. Kasus tersebut mengilustrasikan kekerasan homophobia terhadap spesifik grup dan terinstitusionalisasi oleh negara yang menyponsori homophobia bersama lembaga kepolisian (*People Opposing Women Abuse*, 2010). Lebih dari 10 lesbian menjadi korban perkosaan setiap minggunya di Cape Town (Fihlani, 2011). Kekerasan berbasis gender dan orientasi seksual ini memang telah mengakar dalam masyarakat Afrika Selatan.

Pada dasarnya Individu maupun komunitas memerlukan identitas yang dapat membedakan antara individu maupun komunitas satu dengan lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan kebebasan berasosiasi bagi suatu komunitas yang mana tidak dapat dibatasi oleh kelompok lain. oleh sebab itu, dengan menjunjung ide hak azasi dapat mendorong terhapusnya praktek tradisional yang opresif dan mengancam suatu komunitas.

Perkosaan korektif mengancam *personal security*. *Personal security* menyangkut kebebasan dari rasa takut yang harus terpenuhi oleh individu. Sejatinya individu harus bebas dari ancaman-ancaman yang bersifat fisik maupun psikis. Pelecehan seksual dan perkosaan merupakan ancaman bagi *personal security*.

Seorang lesbian mengatakan bahwa para lesbian lain khawatir karena takut menjadi korban perkosaan korektif berikutnya (Pimpinan Redaksi, Tanpa Tahun). Dalam kasus ini, kaum perempuan terutama lesbian sangat rentan terhadap ancaman fenomena perkosaan korektif yang membatasi pemenuhan *personal security*

mereka. Ini terjadi ketika ide hak azasi manusia belum terealisasi dalam masyarakat. Penolakan sosial melalui perkosaan korektif terhadap kaum LGBT adalah penghalang bagi perempuan terlebih lagi lesbian untuk terhindar dari rasa takut.

Anyamele *et al.* (2005) menyatakan bahwa lesbian di kota-kota kecil di Afrika Selatan memiliki intensitas tinggi untuk diperkosa. Hal ini menciptakan rasa takut bagi lesbian. Padahal perlu diketahui bahwa terciptanya kebebasan rasa takut merupakan hal mendasar terpenuhinya privasi personal perempuan yang mana menjadi perhatian kaum feminis liberal. *Personal privacy* adalah hak private perempuan dalam menentukan jalan hidup mereka yang mana tidak dapat dibatasi oleh siapapun. *Personal privacy* dapat menyangkut kebebasan memilih suatu orientasi seksual, hak untuk terbebas dari tindakan opresif, dan lain sebagainya. *Personal privacy* tercipta ketika kebebasan dari rasa takut teralisasi. Perkosaan korektif telah merampas harkat martabat perempuan-lesbian yang mengindikasikan bahwa mereka adalah warga negara kelas kedua yang patut ditindas. Sehingga ide kesetaraan gender yang menyangkut keadilan dalam mengakses *personal security* belum tercapai.

Padahal section 12 dalam konstitusi 1996 menegaskan jaminan kebebasan dan *security* bagi setiap individu (Wesley, Tanpa Tahun:78). Dalam kasus fenomena perkosaan korektif, tidak dapat dipungkiri bahwa kaum lesbian paling rapuh memperoleh ancaman perkosaan korektif yang mana hak untuk hidup aman dan bebas menjadi terbatas. Mengapa? Pertama, dalam kondisi menunjukkan bahwa perempuan Afrika Selatan secara umum merupakan individu inferior dalam masyarakat Afrika Selatan. Hal tersebut hadir karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ide kesetaraan yang membatasi hak perempuan untuk setara secara sosial, politik, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Standarisasi rendahnya pemahaman tentang ide hak azasi ditunjukkan melalui tingginya penolakan sosial terhadap suatu keberagaman identitas terutama jika menyangkut orientasi seksual. Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan hak perempuan terabaikan.

Tingginya fenomena perkosaan terhadap perempuan di Afrika Selatan menggambarkan bahwa merupakan individu inferior dan kurang memiliki peran penting dalam ranah public sehingga layak untuk memperoleh perlakuan tersebut dan ditindas harkat-martabatnya. Ancaman perkosaan tersebut semakin lebih tinggi jika perempuan tersebut merupakan perempuan berkulit hitam dan lesbian. Inilah yang disebut sebagai *intersectional discrimination and threats*. Perempuan tidak hanya membawa identitasnya sebagai perempuan namun juga identitas lainnya seperti warna kulit, orientasi seksual, dan preferensi identitas lainnya seperti jenis penyakit yang dideritanya. Penyakit HIV dan Aids yang diderita lesbian karena dampak dari perkosaan korektif menambah beban hidup mereka.

Anyamele *et al.* (2005) mengatakan bahwa intensitas ancaman penyakit HIV dan Aids bagi lesbian

di kota kecil Afrika Selatan bersifat medium. Meskipun demikian hal ini tidak mengurangi intensitas ancaman bagi lesbian. Dari data tersebut, probabilitas ancaman terhadap *health security* kaum lesbian semakin besar. Sumber utama dari infeksi penyakit tersebut adalah perkosaan korektif. Disisi lain, Homophobia sering didapatkan oleh lesbian dari polisi dan pekerja klinik ketika mereka hendak berobat pasca perkosaan yang dialami. Mereka diejek dan diusir oleh lembaga tersebut sehingga lesbian lebih memilih tidak berobat untuk mengobati penyakit yang dideritanya (Feder, Tanpa Tahun). Penolakan dari pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lembaga lainnya telah terjadi terhadap penderita HIV sebanyak 15% (UNAIDS, 2013: 85). Hal ini membatasi hak mereka untuk mengakses kebutuhan layanan publik terlebih lagi jika ketika penderita HIV adalah lesbian. Dengan hal ini, ancaman berlipat dialami lesbian. Eksistensi mereka sebagai perempuan terutama warga kulit hitam yang lesbian dan memiliki penyakit HIV menjadikan eksistensi mereka semakin terdesak.

Hal yang dapat kita lihat dari ancaman *health security* adalah hilangnya hak kontrol perempuan terhadap badannya. Hak kontrol yang dimaksud adalah kemampuan perempuan untuk menjaga badannya secara lahir maupun batin. Mereka memiliki kebebasan untuk dan pilihan untuk hidup sehat dan aman.

Pada dasarnya perempuan adalah makhluk rasional yang memiliki hak kontrol penuh terhadap badannya sendiri. Perkosaan melalui tersebut adalah bentuk kontrol masyarakat terhadap badan perempuan yang belum memahami ide hak azasi yang menjadikan perempuan terancam secara fisik maupun psikis. Penyakit HIV yang diderita lesbian telah membatasi hak mereka untuk hidup secara sehat.

### Kesimpulan

Feminis liberal percaya bahwa ketidaksetaraan gender dapat diatasi melalui peran pemerintah dengan membentuk aturan secara legal dan diimplementasi secara nyata. Perkosaan korektif merupakan bentuk pelanggaran konstitusi dan perundangan Afrika Selatan yang sangat menjunjung ide kesetaraan dan non diskriminatif terhadap individu tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual dan identitas personal lainnya. Perkosaan korektif terjadi karena tidak ada komitmen secara nyata dari pemerintah Afrika dalam memperoteksi warga negaranya secara merata. Kurangnya komitmen tersebut dibuktikan oleh rendahnya hukuman dan kasus perkosaan yang dinyatakan bersalah, ketidakpercayaan korban terhadap aparat pemerintah seperti hakim dan lembaga kepolisian dalam menangani kasus tersebut, dan perlakuan intimidasi dari oknum pemerintah. Selain itu, Afrika Selatan belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang *hate crime*. Padahal perlu diketahui bahwa perkosaan korektif termasuk dalam kategori *hate crime*. Oleh sebab itu pemerintah Afrika Selatan tidak memiliki panduan dan kerangka yang cukup dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga

perkosaan korektif sulit diadikasikan. Alasan-alasan tersebut yang telah berkontribusi bagaimana perkosaan korektif terjadi dan mengancam *human security* kaum lesbian.

Perkosaan korektif mengancam *community*, *personal*, dan *health security* dari kaum lesbian. Perkosaan korektif telah membatasi hak komunitas LGBT terutama lesbian untuk berasosiasi secara bebas dan menunjukkan identitasnya. Dengan kata lain, perkosaan korektif adalah langkah eliminasi terhadap LGBT terutama lesbian. Pemenuhan *personal security* kaum lesbian terancam oleh fenomena perkosaan korektif. *Personal security* menyangkut kebebasan dari rasa takut yang harus dijamin bagi setiap individu. Kaum lesbian di Afrika Selatan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses *personal security*. *Health security* dari kaum lesbian di Afrika Selatan. Fenomena perkosaan korektif sangat bersiko menularkan penyakit HIV dan Aids. Tingginya tingkat penderita HIV dan Aids dalam kalangan lesbian disebabkan oleh perkosaan tersebut yang mana memiliki intensitas tinggi terjadi pada kaum lesbian. Pada kenyataannya, penderita HIV dan Aids di Afrika Selatan mengalami diskriminasi khususnya dalam mengakses layanan kesehatan terlebih jika penderitanya adalah perempuan lesbian yang berkulit hitam. Penyakit HIV dan Aids yang diderita lesbian telah membatasi hak kontrol terhadap badan mereka dalam memilih hidup sehat. Karena pada dasarnya hidup sehat adalah pilihan dan keinginan setiap individu. Oleh sebab itu fenomena perkosaan korektif bersifat *intersectional* yang memiliki intensitas ancaman berlipat ganda bagi kaum lesbian di Afrika Selatan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Human Rights Watch. 2011. "We'll Show You You're a Woman" *Violence and Discrimination against Black Lesbians and Transgender Men in South Africa*. United States of America: Human Rights Watch.

Kotef, Hagar. 2009. *On Abstractness: First Wave Liberal Feminism and the Construction of the Abstract Woman*. United States: Feminist Studies.

Tadjbakhsh, S., dan Chenoy, A.M. 2006. *Human Security – Concepts and Implications*. France: Taylor & Francis e-Library.

UNAIDS. 2013. *UNAids report on the global Aids epidemic 2013*. US: United Nations.

United Nations Trust Fund for Human Security. 2009. *Human Security in Theory and Practice*. New York: United Nations.

##### Jurnal dan Karya Tulis Lain

Anguita, L. A. 2011. The International Journal of Human Rights: *Tackling corrective rape in South Africa: the engagement between the LGBT CSOs and the NHRIs (CGE and SAHRC) and its role*. UK: Centre for Applied Human Rights, University of York.

Anymele, C, dkk. 2005. *Sexual Minorities, Violence and AIDS in Africa*. US: World Bank.

Gontek, Ines. 2009. *Sexual Violence Against Lesbian Women in South Africa*. SA: International Resource.Vol. 2, Spring 2009.

Martin, Andrew., dkk. 2009. *The rise of 'corrective' rape in South Africa*. London:ActionAid Hamlyn House.

Mathonsi, Claire. 2011. *South African Shadow Report on The Implementation of The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. SA: Centre for the Study of Violence and Reconciliation People Opposing Women Abuse Western Cape Network on Violence Against Women.

People Opposing Women Abuse (POWA). 2010. *Criminal Injustice: Violence Against Women in South Africa*. South Africa: POWA.

Rahmawati, L. 2003. *Partisipasi Kelompok Agama sebagai Kelompok Kepentingan dalam politik di Amerika Serikat*. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Silvio, L, D. Co. 2011. *Correcting Corrective Rape: Carmichele and Developing South Africa's Affirmative Obligations To Prevent Violence Against Women*. Tanpa Kota: Rice University.

Singh, Ivy. Tanpa Tahun. *Feminism: Various Approaches and Its Values*. Serampore: Serampore College.

Stephens, A, L. 2010. *An Exploration of Hate Crime and Homophobia in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal*. SA: Gay and Lesbian Network.

Wesley, Tiffani. Tanpa Tahun. *Classifying 'Corrective' Rape As Hate Crime:A Call For Justice*. Buwa! A Journal on African Women's Experiences.

##### Internet

Carter, Clare. 2013. *The Brutality of 'Corrective Rape'*. [serial online]. [http://www.nytimes.com/interactive/2013/07/26/opinion/26corrective-rape.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/interactive/2013/07/26/opinion/26corrective-rape.html?_r=0). [01 Oktober 2013].

Coopersmith, Alexis. Tanpa Tahun. *Hate Crimes The Rise of Corrective Rape in South Africa*. [serial online]. <http://www.actionaid.org.uk/news-and-views/hate-crimes-the-rise-of-corrective-rape-in-south-africa>. [01 Oktober 2013].

Dominique, Roberts. 2012. *Rape 'Justification' in South Africa*. [serial online]. [http://adapttoanything.org/AdaptToAnything\\_Rape%20Justification%20in%20South%20Africa.php](http://adapttoanything.org/AdaptToAnything_Rape%20Justification%20in%20South%20Africa.php). [01 Oktober 2013].

Feder, J, L. Tanpa Tahun. *HIV Divides Lesbians In South Africa*. [serial online]. <http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/hiv-divides-lesbians-in-south-africa-9a7s>. HYPERLINK "http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/hiv-divides-lesbians-in-south-africa-9a7s. [07] [07 April 2014].

Fihlani, Pumza. 2011. *South Africa's lesbians fear*

- 'corrective rape'. [serial online]. <http://www.bbc.com/news/world-africa-13908662>. HYPERLINK "http://www.bbc.com/news/world-africa-13908662. [24" [24 Januari 2014].
- Hughes, Dana. 2009. *Being Gay in South Africa, Lesbians Fear 'Corrective' Rape*. [serial online]. <http://abcnews.go.com/>. [01 April 2014].
- Pemimpin Redaksi. 2009. *South African rapist: 'Forgive me'*. [serial online]. <http://www.bbc.com/news/>. [01 Oktober 2013].
- Pemimpin Redaksi. 2009. *South African rapist: 'Forgive me'*. [serial online]. <http://www.bbc.com/news/>. [01 Oktober 2013].
- Pimpinan Redaksi. 2014. *Crisis in* HYPERLINK "<http://www.independent.co.uk/news/world/africa/c-risis-in-south-africa-the-shocking-practice-of-corrective-rape--aimed-at-curing-lesbians-9033224.html>" South Africa HYPERLINK "<http://www.independent.co.uk/news/world/africa/c-risis-in-south-africa-the-shocking-practice-of-corrective-rape--aimed-at-curing-lesbians-9033224.html>": The shocking practice of HYPERLINK "<http://www.independent.co.uk/news/world/africa/c-risis-in-south-africa-the-shocking-practice-of-corrective-rape--aimed-at-curing-lesbians-9033224.html>". [serial online]. [www.independent.co.uk](http://www.independent.co.uk/). [24 Mei 2014].
- Polity Organisation. Tanpa Tahun. *Corrective Rape*. [serial online]. <http://www.polity.org.za/page/opinion>. HYPERLINK K "<http://www.polity.org.za/page/opinion>. [24" [24 Januari 2014].
- Rape Crisis Organisation. Tanpa Tahun. *Rape in South Africa*. [serial online]. <http://rapecrisis.org.za/rape-in-south-africa/>. [01 April 2014].